



KEMENTERIAN PKP
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN KINERJA TRIWULAN II 2026

BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
JAWA I

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2026 Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa I dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

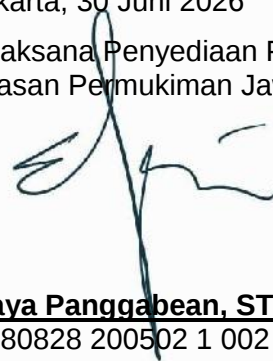
Laporan kinerja ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa I selama Triwulan II Tahun Anggaran 2026, sekaligus sebagai implementasi penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Laporan ini memuat gambaran mengenai capaian kinerja pada triwulan II, pelaksanaan program dan kegiatan, serta evaluasi terhadap hasil yang telah dicapai dalam mendukung pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang layak, aman, dan berkelanjutan di wilayah kerja Jawa I.

Penyusunan laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan dalam pelaksanaan kinerja pada triwulan berikutnya hingga akhir tahun anggaran, serta menjadi sarana transparansi dan akuntabilitas kepada para pemangku kepentingan. Selain itu, laporan ini juga diharapkan dapat memberikan informasi yang komprehensif mengenai kontribusi Balai dalam mendukung kebijakan dan program strategis pemerintah di bidang perumahan dan kawasan permukiman.

Akhir kata, kami menyadari bahwa laporan ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, saran dan masukan yang konstruktif sangat diharapkan guna penyempurnaan laporan kinerja di masa mendatang.

Jakarta, 30 Juni 2026

Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan
dan Kawasan Permukiman Jawa I



Elias Wijaya Panggabean, ST.,MT.

NIP. 19780828 200502 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tugas dan Fungsi	2
1.3 Struktur Organisasi	3
BAB II CAPAIAN KINERJA	5
2.1 Target Kinerja Triwulan I	5
2.2 Capaian Target Triwulan	8
BAB III PENUTUP	15
3.1 Rencana Tindak Lanjut	15

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Target Penetapan Kinerja BP3KP Jawa I Triwulan I Tahun 2026	5
Tabel 2. 2 Capaian Kinerja BP3KP Jawa I Triwulan I Tahun 2026	8
Tabel 3. 1 Permasalahan dan Rencana Tindak Lanjut Kegiatan BP3KP Jawa I Triwulan I Tahun 2026.....	16

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi BP3KP	4
Gambar 1. 2 Struktur Organisasi BP3KP Jawa I.....	4

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan akuntabel, setiap instansi pemerintah diwajibkan menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) secara terintegrasi. SAKIP merupakan instrumen penting yang menghubungkan proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program, serta pelaporan kinerja secara sistematis dan berkesinambungan. Melalui penerapan SAKIP, capaian kinerja instansi pemerintah dapat dipantau, diukur, dan dievaluasi secara berkala sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Sebagai Unit Pelaksana Teknis di bawah Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Jawa I memiliki kewajiban untuk menyampaikan informasi kinerja secara periodik sebagai bagian dari pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan. Salah satu bentuk pelaporan tersebut adalah Laporan Kinerja Triwulanan yang disusun sebagai media monitoring capaian kinerja dalam kurun waktu tiga bulanan.

Penyusunan laporan kinerja triwulanan dilaksanakan mengacu pada ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP, serta Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja, beserta peraturan terkait lainnya. Regulasi tersebut menegaskan pentingnya pelaporan kinerja secara berkala guna memastikan keselarasan antara perencanaan dan pelaksanaan serta mendukung pengambilan keputusan yang tepat waktu.

Laporan kinerja triwulanan disusun untuk memberikan gambaran mengenai perkembangan capaian indikator kinerja, realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, serta pemanfaatan sumber daya dalam periode triwulan berjalan. Selain itu, laporan ini juga memuat identifikasi kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah tindak lanjut yang diperlukan sebagai upaya perbaikan kinerja pada periode berikutnya.

Sejalan dengan semangat reformasi birokrasi dan penerapan prinsip good governance, penyusunan laporan kinerja triwulanan menjadi bagian penting dalam siklus manajemen kinerja di lingkungan BP3KP Jawa I, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, pelaporan, serta monitoring dan evaluasi kinerja secara berkelanjutan.

Dengan demikian, penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan BP3KP Jawa I Tahun 2026 merupakan wujud komitmen organisasi dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja, sekaligus sebagai instrumen pengendalian internal untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan tetap berada pada jalur yang telah direncanakan serta mendukung pencapaian target kinerja tahunan secara optimal.

1.2 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disingkat BP3KP adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang melaksanakan tugas teknis operasional di bidang penyediaan perumahan dan kawasan permukiman, dengan rincian tugas yaitu melaksanakan penyediaan perumahan, peningkatan kualitas perumahan, pengembangan kawasan permukiman, penataan kawasan permukiman pasca bencana dan kerusakan sosial, serta fasilitasi serah terima aset. Dalam melaksanakan tugas tersebut, diselenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program dan anggaran pelaksanaan pengembangan kawasan permukiman, pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
- b. penyusunan rencana teknis pengembangan kawasan permukiman, pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
- c. pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
- d. pelaksanaan dan koordinasi pengawasan dan pengendalian teknis pengembangan kawasan permukiman, pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
- e. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
- f. pengelolaan data dan informasi perumahan dan kawasan permukiman;
- g. pelaksanaan koordinasi dan dukungan penataan kawasan permukiman pasca bencana dan kerusakan sosial;
- h. pelaksanaan koordinasi penyediaan lahan dan pengembangan hunian;
- i. pelaksanaan koordinasi pemanfaatan dan penghunian perumahan;
- j. pelaksanaan fasilitasi bina usaha dan perlindungan konsumen perumahan;
- k. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi forum perumahan dan kawasan permukiman;
- l. pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan koordinasi fasilitasi pembiayaan perumahan;
- m. pelaksanaan fasilitasi serah terima aset;
- n. pelaksanaan dan koordinasi reformasi birokrasi, pembangunan zona integritas, sistem pengendalian intern, sistem manajemen risiko, serta sistem pengendalian anti korupsi dan penyuapan; dan

- o. pelaksanaan urusan tata usaha, umum dan rumah tangga, komunikasi publik, serta layanan hukum balai.

1.3 Struktur Organisasi

Susunan organisasi BP3KP Jawa I terbentuk berdasarkan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2025. Secara organisasi BP3KP Jawa I membawahi 2 (dua) wilayah satuan kerja (satker), diantaranya yaitu Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman DK Jakarta dan Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Banten.

Susunan organisasi di BP3KP Jawa I terdiri dari Kepala Balai dan didukung oleh Subbagian Umum dan Tata Usaha, Seksi Pelaksana Wilayah I, Seksi Pelaksana Wilayah II, serta Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana. Berikut ini merupakan susunan organisasi dan tugasnya masing-masing di BP3KP Jawa I:

1. Kepala Balai

Bertanggung jawab atas pelaksanaan seluruh tugas dan fungsi BP3KP di wilayah kerja Jawa I yang meliputi Provinsi Daerah Khusus Jakarta dan Provinsi Banten.

2. Subbagian Umum dan Tata Usaha

Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan anggaran, pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga, administrasi sumber daya manusia, pengelolaan dan pelaporan administrasi keuangan, koordinasi reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas, penerapan sistem pengendalian intern dan manajemen risiko, pelaksanaan komunikasi publik, serta pemberian layanan hukum balai.

3. Seksi Pelaksana Wilayah I

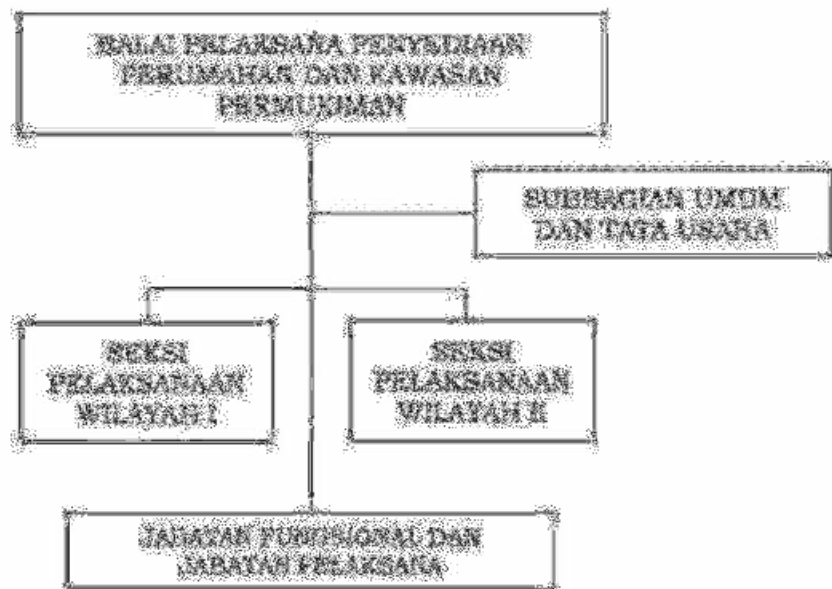
Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembangunan dan koordinasi penyusunan rencana teknis perumahan, koordinasi penyediaan lahan, pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kualitas rumah serta prasarana, sarana, dan utilitas umum, fasilitas hunian, pengawasan dan pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta verifikasi data pada wilayah perkotaan, perdesaan, dan pesisir di Provinsi Daerah Khusus Jakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Seksi Pelaksana Wilayah II

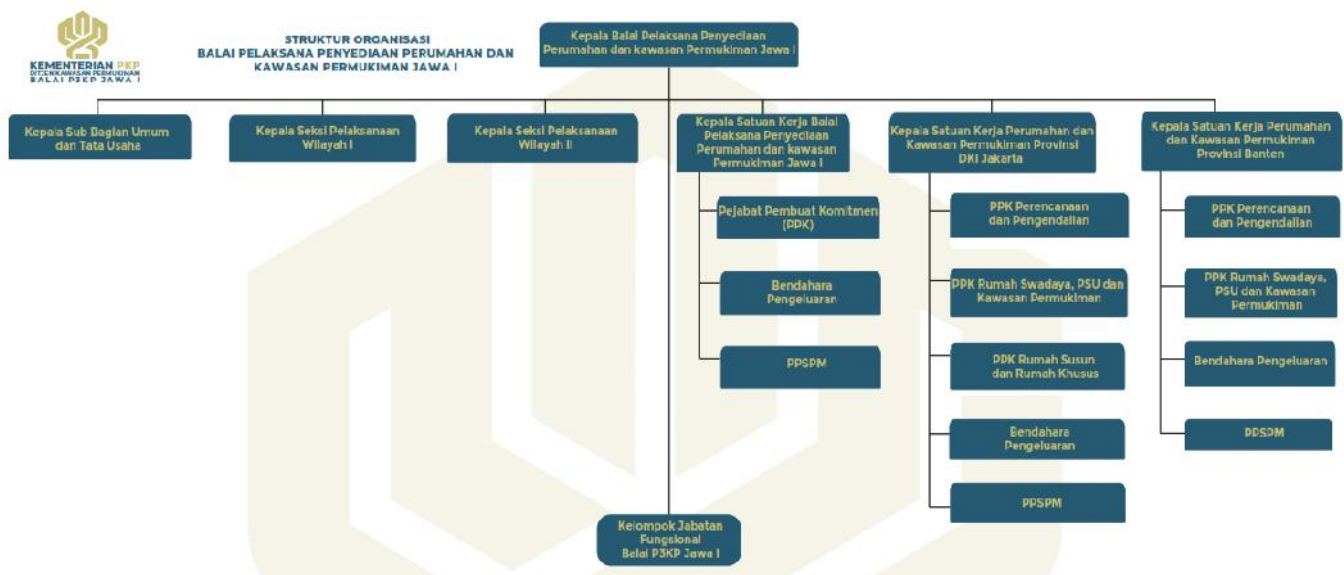
Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembangunan dan koordinasi penyusunan rencana teknis perumahan, koordinasi penyediaan lahan, pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kualitas rumah serta prasarana, sarana, dan utilitas umum, fasilitas hunian, pengawasan dan pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta verifikasi data pada wilayah perkotaan, perdesaan, dan pesisir di Provinsi Banten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana

Mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi UPT sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Jabatan fungsional dan jabatan pelaksana dapat ditetapkan di lingkungan UPT sesuai dengan kebutuhan, yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Gambar 1. 1 Struktur Organisasi BP3KP



Gambar 1. 2 Struktur Organisasi BP3KP Jawa I

BAB II

CAPAIAN KINERJA

2.1 Target Kinerja Triwulan I

Untuk mencapai target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2026, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Jawa I menjabarkan target pencapaian tahun 2026 dalam target kinerja triwulanan. Target kinerja triwulanan menjadi salah satu instrumen untuk melihat capaian kinerja secara berkala yang nantinya akan disampaikan dalam Laporan Kinerja Triwulanan sebagai berikut.

Tabel 2. 1 Target Penetapan Kinerja BP3KP Jawa I Triwulan II Tahun 2026

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET PK	TARGET CAPAIAN PER TRIWULAN (%)			
					TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
SEKRETARIAT JENDERAL								
1.	Meningkatnya layanan dukungan manajemen balai	Jumlah Layanan Umum	Layanan	3	25,63	42,43		
		Jumlah Layanan Perkantoran	Layanan	3				
		Jumlah Layanan Sarana Internal	Unit	14				
DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN								
1.	Terselenggaranya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam mendukung penyediaan rumah layak huni	Jumlah Laporan Penyusunan Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rekomendasi Kebijakan	1	32,23	49,16		
2.	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni di kawasan permukiman	Jumlah Dokumen Teknis Penyiapan Penanganan Kumuh dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Dokumen	1				
		Jumlah Unit Rumah Swadaya melalui Peningkatan Kualitas (PK)	Unit	1.131				
3.	Meningkatnya layanan dukungan manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman	Jumlah Layanan BMN	Layanan	1				
		Jumlah Layanan Umum	Layanan	3				
		Jumlah Layanan Data dan Informasi	Layanan	1				

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET PK	TARGET CAPAIAN PER TRIWULAN (%)			
					TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN								
1.	Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan perumahan perdesaan	Jumlah Dokumen Kebijakan, Kemitraan, Strategi, Dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	Rekomendasi Kebijakan	1	38	67,50		
		Jumlah Dokumen Data Dan Informasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	Dokumen	1				
		Jumlah Laporan Pemantauan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	Laporan	1				
2.	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni di wilayah perdesaan	Jumlah Laporan Pemantauan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perdesaan	Laporan	1				
		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perdesaan	Rekomendasi Kebijakan	1				
		Jumlah Laporan Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan	Rekomendasi Kebijakan	1				
		Jumlah Unit Rumah Swadaya melalui Peningkatan Kualitas	Unit	3.965				
		Jumlah Rumah Khusus yang Terbangun	Unit	221				
3.	Meningkatnya layanan dukungan manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan	Jumlah Layanan Umum	Layanan	2				
		Jumlah Layanan Data dan Informasi	Layanan	1				
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN								
1.	Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan, Kemitraan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	Rekomendasi Kebijakan	1	46,29	73,50		

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET PK	TARGET CAPAIAN PER TRIWULAN (%)			
					TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
	perumahan perkotaan	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	Laporan	1				
2.	Meningkatnya akses penyiapan lahan, perizinan dan penghunian perumahan perkotaan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perkotaan	Rekomendasi Kebijakan	1				
3.	Meningkatnya akses rumah tangga yang terfasilitasi pembiayaan perumahan di wilayah perkotaan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan Perkotaan	Rekomendasi Kebijakan	1				
4.	Meningkatnya ketersediaan rumah baru layak huni di perkotaan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perkotaan	Rekomendasi Kebijakan	1				
5.	Meningkatnya penyediaan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas pembangunan perumahan di wilayah perkotaan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan	Rekomendasi Kebijakan	1				
		Jumlah Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di Perkotaan	Unit	4.819				
6.	Meningkatnya perencanaan, fasilitasi penyiapan lahan dan pemenuhan rumah yang terlayani PSU di perkotaan	Jumlah Pembangunan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman	Unit	124				
7.	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan	Jumlah Layanan BMN	Layanan	1				
		Jumlah Layanan Umum	Layanan	3				
		Jumlah Layanan Data dan Informasi	Layanan	1				

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET PK	TARGET CAPAIAN PER TRIWULAN (%)			
					TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
DIREKTORAT JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO								
1.	Meningkatnya dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel	Jumlah Kebijakan Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas	Rekomendasi Kebijakan	1	2,97	7,36		
2.	Meningkatnya dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman	Jumlah Kebijakan Manajemen Risiko dan Pencegahan Korupsi	Rekomendasi Kebijakan	2				
3.	Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko perumahan dan kawasan permukiman	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	Laporan	1				

2.2 Capaian Target Triwulan

Capaian kinerja BP3KP Jawa I pada triwulan II tahun 2026 yang disajikan pada tabel di bawah ini menunjukkan tingkat realisasi pelaksanaan program dan kegiatan sebagai hasil dari proses perencanaan dan penganggaran yang telah dilakukan. Informasi ini menjadi landasan dalam melakukan evaluasi kinerja secara komprehensif, khususnya dalam menilai kesesuaian antara target dan realisasi serta merumuskan langkah perbaikan pada triwulan berikutnya.

Tabel 2. 2 Capaian Kinerja BP3KP Jawa I Triwulan I Tahun 2026

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	CAPAIAN	KINERJA (%)
SEKRETARIAT JENDERAL						
1.	Meningkatnya layanan dukungan manajemen balai	Jumlah Layanan Umum	Layanan	3		41,44
		Jumlah Layanan Perkantoran	Layanan	3		
		Jumlah Layanan Sarana Internal	Unit	14		

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	CAPAIAN	KINERJA (%)
DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN						
1.	Terselenggaranya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam mendukung penyediaan rumah layak huni	Jumlah Laporan Penyusunan Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rekomendasi Kebijakan	1		47,82
2.	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni di kawasan permukiman	Jumlah Dokumen Teknis Penyiapan Penanganan Kumuh dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Dokumen	1		
		Jumlah Unit Rumah Swadaya melalui Peningkatan Kualitas (PK)	Unit	600		
3.	Meningkatnya layanan dukungan manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman	Jumlah Layanan BMN	Layanan	1		
		Jumlah Layanan Umum	Layanan	3		
		Jumlah Layanan Data dan Informasi	Layanan	1		
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN						
1.	Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan perumahan perdesaan	Jumlah Dokumen Kebijakan, Kemitraan, Strategi, Dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	Rekomendasi Kebijakan	1		69,17
		Jumlah Dokumen Data Dan Informasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	Dokumen	1		
		Jumlah Laporan Pemantauan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	Laporan	1		
2.	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni di wilayah perdesaan	Jumlah Laporan Pemantauan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perdesaan	Laporan	1		

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	CAPAIAN	KINERJA (%)
		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perdesaan	Rekomendasi Kebijakan	1		
		Jumlah Laporan Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan	Rekomendasi Kebijakan	1		
		Jumlah Unit Rumah Swadaya melalui Peningkatan Kualitas	Unit	900		
		Jumlah Rumah Khusus yang Terbangun	Unit	221		
3.	Meningkatnya layanan dukungan manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan	Jumlah Layanan Umum	Layanan	2		
		Jumlah Layanan Data dan Informasi	Layanan	1		
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN						
1.	Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan perumahan perkotaan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan, Kemitraan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	Rekomendasi Kebijakan	1		78,71
		Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	Laporan	3		
2.	Meningkatnya akses penyiapan lahan, perizinan dan penghunian perumahan perkotaan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perkotaan	Rekomendasi Kebijakan	1		
3.	Meningkatnya akses rumah tangga yang terfasilitasi pembiayaan perumahan di wilayah perkotaan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan Perkotaan	Rekomendasi Kebijakan	1		

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	CAPAIAN	KINERJA (%)
4.	Meningkatnya ketersediaan rumah baru layak huni di perkotaan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perkotaan	Rekomendasi Kebijakan	1		
5.	Meningkatnya penyediaan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas pembangunan perumahan di wilayah perkotaan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan	Rekomendasi Kebijakan	1		
		Jumlah Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di Perkotaan	Unit	2.900		
6.	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan	Jumlah Layanan BMN	Layanan	1		
		Jumlah Layanan Umum	Layanan	3		
		Jumlah Layanan Data dan Informasi	Layanan	1		
DIREKTORAT JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO						
1.	Meningkatnya dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel	Jumlah Kebijakan Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas	Rekomendasi Kebijakan	1		14,10
2.	Meningkatnya dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman	Jumlah Kebijakan Manajemen Risiko dan Pencegahan Korupsi	Rekomendasi Kebijakan	2		
3.	Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko perumahan dan kawasan permukiman	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	Laporan	1		

2.3 Potensi dan Permasalahan Capaian Triwulan

Pelaksanaan tugas dan fungsi BP3KP Jawa I pada Triwulan II Tahun 2026 menunjukkan perkembangan yang lebih baik dibandingkan triwulan sebelumnya. Hal ini

ditandai dengan meningkatnya capaian indikator kinerja pada sebagian besar sasaran kegiatan, serta telah dimulainya pelaksanaan fisik pada sejumlah program penyediaan rumah layak huni, penanganan kawasan permukiman, dan kegiatan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kendala yang mempengaruhi percepatan pencapaian target tahunan, baik yang berasal dari faktor internal maupun eksternal. Oleh karena itu, identifikasi terhadap potensi dan permasalahan menjadi bagian penting dalam penyusunan langkah tindak lanjut guna mengoptimalkan pencapaian kinerja pada triwulan berikutnya.

2.3.1 Potensi

Pelaksanaan program dan kegiatan BP3KP Jawa I sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 menunjukkan perkembangan yang positif. Hal ini tercermin dari meningkatnya capaian kinerja pada sebagian besar sasaran kegiatan, terutama pada program yang telah memasuki tahap pelaksanaan fisik maupun penyelesaian dokumen pendukung. Potensi yang dapat dioptimalkan antara lain:

1. Meningkatnya realisasi pelaksanaan program penyediaan rumah layak huni
Program peningkatan kualitas rumah swadaya pada Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan, dan Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan telah berkembang dari tahap persiapan menjadi tahap pelaksanaan fisik di lapangan. Pelaksanaan verifikasi, sosialisasi, penandatanganan kerja sama bank penyalur, pemilihan toko penyedia material, serta dimulainya pekerjaan konstruksi menjadi modal penting dalam percepatan pencapaian target penyediaan rumah layak huni pada triwulan II.
2. Meningkatnya capaian indikator kinerja yang berbasis kebijakan, koordinasi, dan pemantauan
Sebagian besar indikator yang berkaitan dengan penyusunan rekomendasi kebijakan, penyusunan dokumen, pemantauan, evaluasi, dan koordinasi lintas sektor menunjukkan perkembangan yang sesuai dengan target Triwulan II. Kondisi tersebut menjadi landasan yang kuat dalam mendukung pelaksanaan program fisik pada triwulan berikutnya.
3. Penguatan kolaborasi dalam penyediaan rumah layak huni melalui kemitraan
Pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) menunjukkan perkembangan yang signifikan melalui keterlibatan berbagai perusahaan, yayasan, dan organisasi dalam pembangunan maupun peningkatan kualitas rumah. Sebagian kegiatan telah selesai, sementara kegiatan lainnya sedang berlangsung sehingga mendukung percepatan pencapaian target penyediaan rumah layak huni di wilayah kerja BP3KP Jawa I.

4. Terlaksananya penanganan kawasan permukiman secara terpadu

Pelaksanaan penataan kawasan permukiman melalui kegiatan direktif Menteri PKP tidak hanya mencakup renovasi rumah, tetapi juga penataan lingkungan, pengembangan UMKM, penataan ruang publik, dan beautifikasi kawasan. Pendekatan terpadu tersebut berpotensi meningkatkan kualitas kawasan permukiman secara berkelanjutan sekaligus memperkuat sinergi antarprogram.

5. Meningkatnya kualitas layanan pendukung organisasi

Layanan dukungan manajemen balai, layanan umum, pengelolaan BMN, data dan informasi, serta penyelenggaraan Klinik PKP terus mengalami peningkatan sehingga mendukung kelancaran pelaksanaan seluruh program dan kegiatan BP3KP Jawa I.

2.3.2 Permasalahan

Meskipun capaian kinerja Triwulan II menunjukkan peningkatan dibandingkan Triwulan I, masih terdapat beberapa kendala yang memerlukan perhatian agar target kinerja tahunan dapat tercapai secara optimal.

a. Faktor Internal

1. Progres pelaksanaan fisik antarprogram dan antarwilayah belum merata

Beberapa kegiatan pembangunan rumah swadaya maupun penanganan kawasan telah memasuki tahap pelaksanaan fisik, namun tingkat progres antar lokasi masih bervariasi. Sebagian lokasi telah mencapai penyelesaian, sementara lokasi lainnya masih berada pada tahap awal pelaksanaan sehingga memerlukan pengendalian dan percepatan pelaksanaan secara berkelanjutan.

2. Penyelesaian indikator berbasis dokumen dan rekomendasi masih berlangsung

Beberapa indikator kinerja yang menghasilkan rekomendasi kebijakan, laporan, dokumen teknis, maupun hasil pemantauan belum sepenuhnya selesai pada Triwulan II karena penyusunannya mengikuti tahapan pelaksanaan program dan akan disempurnakan pada triwulan berikutnya.

3. Meningkatnya kebutuhan monitoring dan pengendalian pelaksanaan program

Dengan bertambahnya jumlah kegiatan yang memasuki tahap pelaksanaan fisik, kebutuhan monitoring, evaluasi, pendampingan teknis, dan pengendalian mutu pekerjaan menjadi semakin tinggi agar pelaksanaan kegiatan tetap sesuai target waktu, mutu, dan sasaran.

b. Faktor Eksternal

1. Kecepatan pelaksanaan fisik dipengaruhi oleh kesiapan para pemangku kepentingan

Pelaksanaan program masih memerlukan dukungan pemerintah daerah, masyarakat penerima manfaat, penyedia jasa, bank penyalur, dan tenaga pendamping sehingga

keterlambatan pada salah satu pihak dapat mempengaruhi percepatan pencapaian target program.

2. Pelaksanaan kemitraan melalui CSR bergantung pada komitmen masing-masing mitra. Perbedaan kesiapan pendanaan, jadwal pelaksanaan, serta kapasitas masing-masing mitra menyebabkan progres kegiatan CSR tidak berlangsung secara seragam sehingga memerlukan koordinasi dan sinkronisasi secara berkelanjutan.
3. Dinamika pelaksanaan pekerjaan di lapangan berpotensi mempengaruhi pencapaian target tahunan.

Pelaksanaan pekerjaan konstruksi dipengaruhi oleh kondisi lapangan, ketersediaan material, mobilisasi tenaga kerja, kondisi cuaca, serta penyesuaian teknis selama pelaksanaan sehingga diperlukan pengendalian risiko secara berkelanjutan untuk menjaga capaian kinerja hingga akhir tahun.

BAB III

PENUTUP

3.1 Rencana Tindak Lanjut

Sebagai upaya meningkatkan pencapaian target kinerja sampai akhir Tahun 2026, BP3KP Jawa I akan melaksanakan langkah-langkah tindak lanjut sebagai berikut:

1. Percepatan penyelesaian tahapan verifikasi dan persiapan program
Melakukan percepatan penyelesaian verifikasi administrasi, verifikasi teknis, dan validasi data pada kegiatan BSPS, penanganan permukiman kumuh, dan bantuan Rumah Khusus guna memastikan kesiapan pelaksanaan kegiatan pada tahap berikutnya.
2. Percepatan penyelesaian pelaksanaan fisik program penyediaan rumah layak huni
Melakukan percepatan pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kualitas rumah swadaya pada seluruh lokasi kegiatan melalui penguatan koordinasi dengan tenaga pendamping, penyedia material, bank penyalur, pemerintah daerah, dan penerima bantuan sehingga target penyelesaian fisik dapat tercapai sesuai jadwal.
3. Penguatan monitoring dan pengendalian pelaksanaan kegiatan di lapangan
Meningkatkan intensitas monitoring dan evaluasi terhadap progres fisik maupun administrasi seluruh kegiatan secara berkala untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan dengan target waktu, mutu pekerjaan, serta ketentuan teknis yang berlaku. Hasil monitoring digunakan sebagai dasar percepatan penyelesaian kegiatan yang mengalami deviasi dari rencana.
4. Percepatan penyelesaian indikator kinerja berbasis dokumen dan rekomendasi kebijakan
Mempercepat penyusunan dokumen teknis, laporan pemantauan dan evaluasi, rekomendasi kebijakan, serta data pendukung lainnya pada seluruh Direktorat Jenderal agar indikator kinerja nonfisik dapat diselesaikan sesuai target Triwulan III dan target akhir tahun.
5. Penguatan koordinasi lintas unit dan pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan program
Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah, satuan kerja terkait, serta pemangku kepentingan lainnya untuk mempercepat penyelesaian permasalahan di lapangan, pemenuhan persyaratan administrasi, serta mendukung kelancaran pelaksanaan program penyediaan rumah layak huni.
6. Optimalisasi pelaksanaan program CSR
Mendorong percepatan pelaksanaan kegiatan CSR yang masih berproses melalui penguatan koordinasi dengan seluruh mitra pembangunan, sehingga kegiatan

peningkatan kualitas rumah, pembangunan rumah baru, penataan lingkungan, serta pengembangan UMKM dapat diselesaikan sesuai komitmen yang telah ditetapkan.

7. Percepatan penanganan kawasan permukiman secara terpadu
Mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan penataan kawasan permukiman melalui percepatan pekerjaan fisik, penataan lingkungan, beautifikasi kawasan, serta pemberdayaan masyarakat sehingga manfaat program dapat segera dirasakan oleh masyarakat sekaligus mendukung peningkatan kualitas kawasan permukiman.
8. Optimalisasi layanan dukungan manajemen dan pelayanan publik
Meningkatkan kualitas layanan dukungan manajemen, pengelolaan BMN, layanan data dan informasi, serta pelayanan Klinik PKP melalui penyelenggaraan sosialisasi, konsultasi, dan pendampingan kepada pemerintah daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan guna mendukung kelancaran pelaksanaan program dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
9. Penguatan pengendalian kinerja dan manajemen risiko
Melaksanakan evaluasi capaian indikator kinerja secara berkala disertai penerapan manajemen risiko pada setiap tahapan pelaksanaan kegiatan untuk mengidentifikasi potensi hambatan lebih dini, menetapkan langkah mitigasi, serta memastikan seluruh target kinerja tahunan dapat dicapai secara efektif dan akuntabel

Tabel 3. 1 Permasalahan dan Rencana Tindak Lanjut Kegiatan BP3KP Jawa I Triwulan II Tahun 2026

TRIWULAN I		
Permasalahan		Rencana Tindak Lanjut
SEKRETARIAT JENDERAL		
1.	Pelaksanaan layanan dukungan manajemen, layanan perkantoran, serta layanan sarana internal masih memerlukan optimalisasi agar seluruh target layanan tahunan dapat tercapai sesuai rencana	Melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap capaian layanan, mempercepat penyelesaian kegiatan yang masih berproses, serta meningkatkan koordinasi antarunit kerja dalam pemenuhan kebutuhan operasional balai
2.	Penyusunan dokumen SAKIP memerlukan penguatan kualitas data dukung dan keselarasan antara perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja, serta ketepatan waktu penyampaian laporan dari seluruh unit kerja	Melakukan reviu dan validasi data kinerja secara berkala, meningkatkan koordinasi dengan penanggung jawab kegiatan, serta memastikan keselarasan antara perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja.
DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN		
1.	Pelaksanaan kegiatan penanganan kawasan permukiman dan bantuan peningkatan kualitas perumahan MBR belum sepenuhnya merata sehingga diperlukan percepatan penyelesaian pekerjaan sesuai target	Meningkatkan pengendalian pelaksanaan melalui monitoring lapangan secara berkala, mempercepat penyelesaian pekerjaan fisik, serta memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dan pihak pelaksana kegiatan

TRIWULAN I		
Permasalahan		Rencana Tindak Lanjut
2.	Penyusunan dokumen teknis, laporan pemantauan, dan evaluasi masih berlangsung mengikuti perkembangan pelaksanaan kegiatan	Mempercepat penyelesaian dokumen teknis dan laporan pemantauan sebagai dasar evaluasi pelaksanaan program serta mendukung pencapaian indikator kinerja Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman
3.	Pemanfaatan layanan Klinik PKP masih perlu terus ditingkatkan agar mampu menjangkau lebih banyak pemerintah daerah dan masyarakat	Melanjutkan sosialisasi, konsultasi, dan pendampingan Klinik PKP secara berkelanjutan melalui koordinasi dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN		
1.	Pelaksanaan fisik BPS telah berjalan, namun progres antar lokasi masih bervariasi sehingga diperlukan percepatan penyelesaian untuk mencapai target tahunan	Meningkatkan monitoring terhadap progres fisik, memperkuat koordinasi dengan tenaga fasilitator, bank penyalur, penyedia material, dan pemerintah daerah untuk mempercepat penyelesaian pembangunan rumah swadaya
2.	Pelaksanaan pembangunan Rumah Khusus masih memerlukan penyelesaian koordinasi teknis, administrasi, dan kesiapan lokasi pada sebagian usulan kegiatan.	Mempercepat penyelesaian dokumen administrasi dan teknis, serta memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait agar pelaksanaan pembangunan dapat berjalan sesuai jadwal
3.	Sebagian kegiatan kemitraan dan CSR masih berada pada tahap pelaksanaan sehingga memerlukan pengendalian untuk memastikan target penyelesaian tercapai	Meningkatkan koordinasi dan monitoring bersama mitra CSR, melakukan evaluasi berkala terhadap progres pelaksanaan, serta menyelesaikan hambatan yang muncul selama pelaksanaan kegiatan
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN		
1.	Pelaksanaan BPS di wilayah perkotaan telah memasuki tahap pelaksanaan fisik, namun masih diperlukan percepatan pada lokasi dengan progres rendah agar target tahunan dapat tercapai	Melaksanakan monitoring lapangan secara berkala, memperkuat pendampingan tenaga fasilitator, serta melakukan percepatan penyelesaian pekerjaan fisik bersama seluruh pemangku kepentingan
2.	Pelaksanaan program CSR perumahan, renovasi RTLH, penataan lingkungan, dan pemberdayaan UMKM masih memerlukan penguatan koordinasi antar mitra pelaksana	Mengoptimalkan koordinasi dengan seluruh mitra CSR, melakukan monitoring progres kegiatan secara berkala, serta memastikan penyelesaian kegiatan sesuai komitmen dan jadwal pelaksanaan
3.	Pelaksanaan pembangunan PSU perumahan masih memerlukan penguatan koordinasi dalam proses perencanaan dan pelaksanaan agar target indikator dapat dicapai	Mempercepat koordinasi dengan pemerintah daerah dan unit teknis terkait, serta melakukan monitoring terhadap kesiapan lokasi dan pelaksanaan pembangunan PSU
DIREKTORAT JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO		

TRIWULAN I		
Permasalahan		Rencana Tindak Lanjut
1.	Pelaksanaan pembangunan Zona Integritas masih memerlukan penguatan implementasi area perubahan serta pemenuhan eviden sebagai bagian dari evaluasi pembangunan ZI	Melakukan monitoring pemenuhan eviden secara berkala, memperkuat koordinasi kelompok kerja, serta meningkatkan internalisasi pembangunan Zona Integritas kepada seluruh pegawai
2.	Penerapan manajemen risiko memerlukan penguatan pemantauan efektivitas rencana tindak pengendalian seiring meningkatnya pelaksanaan program fisik pada Triwulan II	Melaksanakan reviu register risiko secara berkala, memantau pelaksanaan rencana tindak pengendalian, serta memastikan setiap unit kerja melakukan mitigasi terhadap risiko yang berpotensi menghambat pencapaian target kinerja